

**PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (PILKADES) TAHUN 2023 DI DESA TRAYEMAN KECAMATAN SLAWI  
KABUPATEN TEGAL**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka penyelesaian Studi Strata 1 (S1) untuk mencapai gelar sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Oleh:**

**HINZA PRIATMA ADLI**

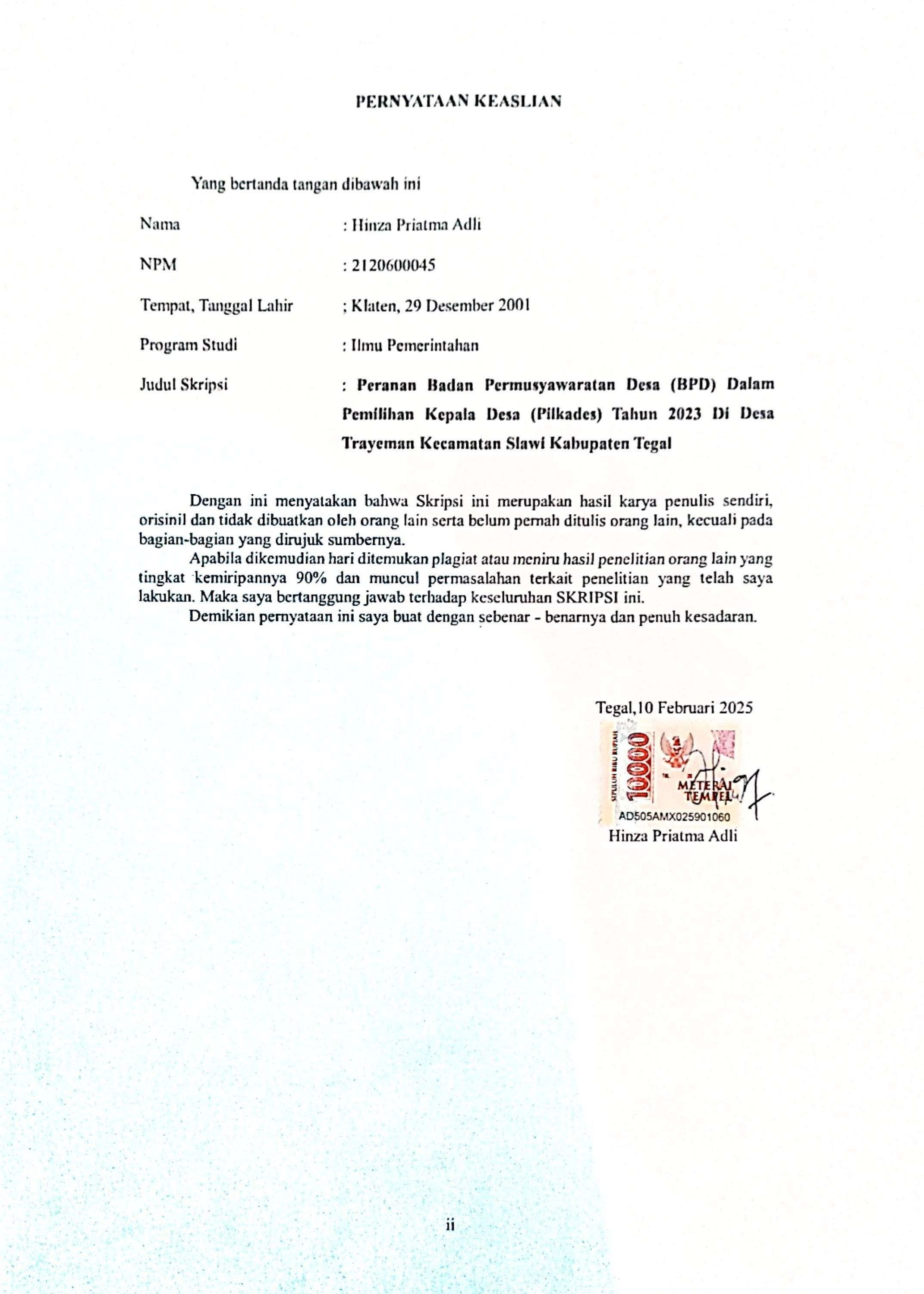
**NPM : 2120600045**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

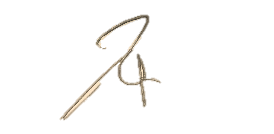
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

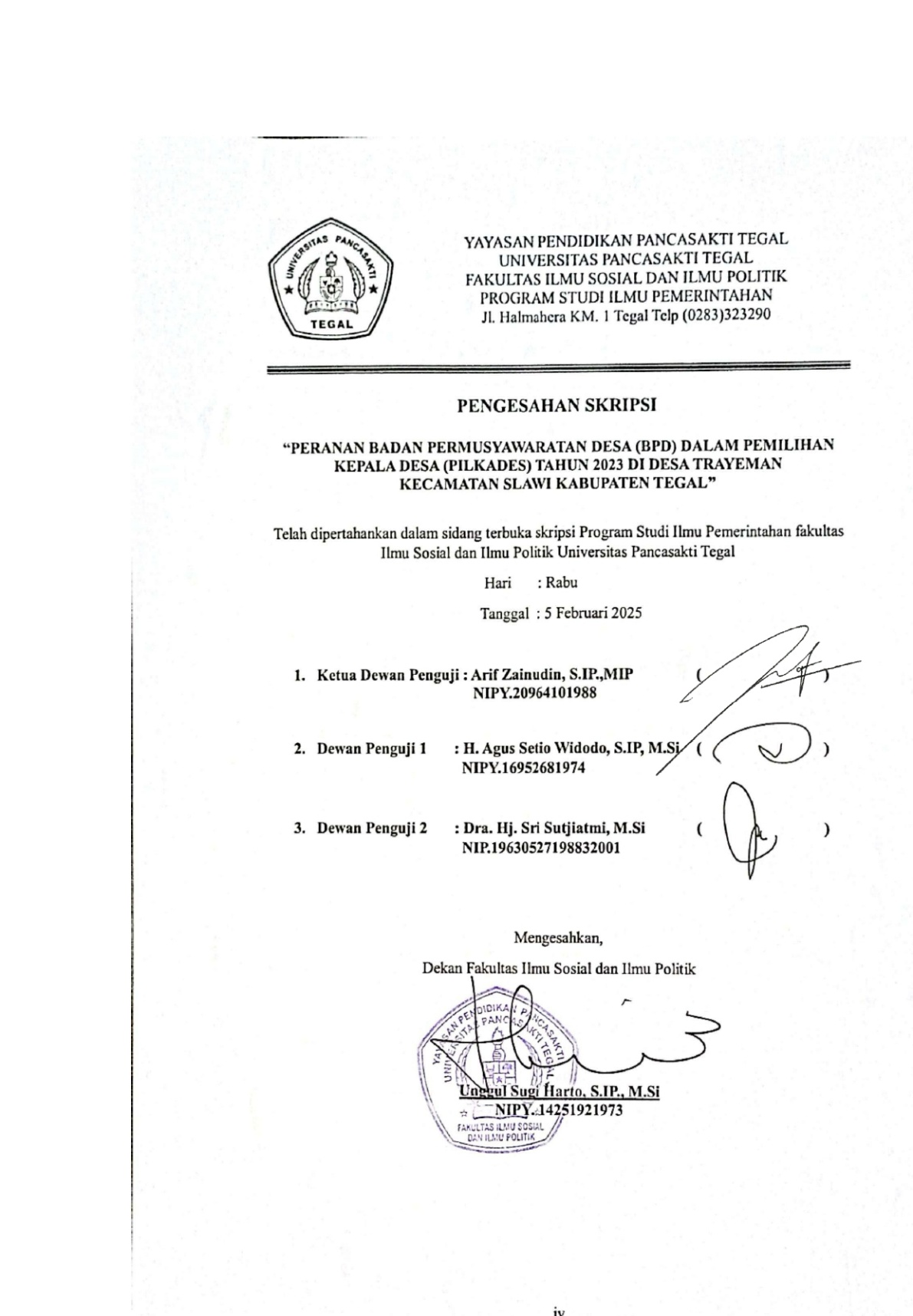
**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**202****5**









# ABSTRAK

Hinza Priatma Adli. NPM 2120600045. 2024*. PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (PILKADES) TAHUN 2023 DI DESA TRAYEMAN KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL*. Skripsi, Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti Tegal. Pembimbing I : Dra.Hj Sri Sutjiatmi, M.Si dan Pembimbing II : H.Agus Setio Widodo.S.IP M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahun 2023. BPD sebagai lembaga legislatif di tingkat desa memiliki tanggung jawab penting dalam mengawasi dan memastikan proses pemilihan berlangsung secara demokratis, transparan, dan akuntabel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD berperan aktif dalam berbagai tahapan Pilkades, mulai dari pembentukan panitia pemilihan hingga pengawasan penggunaan anggaran. Meskipun demikian, terdapat tantangan signifikan yang dihadapi BPD, termasuk, kurangnya pemahaman masyarakat tentang fungsi dan tugas BPD. Banyak warga desa yang hanya merasakan keberadaan BPD secara terbatas, sehingga aspirasi mereka tidak sepenuhnya terwakili. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai proses pemilihan serta fungsi BPD menyebabkan banyak masyarakat tidak aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi desa.

Penelitian ini juga menemukan bahwa BPD sering kali berfungsi sebagai alat legitimasi bagi Kepala Desa, alih-alih sebagai pengawas yang independen. Hal ini mengakibatkan lemahnya mekanisme check and balances dalam pemerintahan desa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas anggota BPD melalui pelatihan dan sosialisasi yang lebih baik, serta upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Rekomendasi ini diharapkan dapat memperkuat peran BPD dalam menciptakan pemerintahan desa yang lebih transparan dan akuntabel.

**Kata Kunci: BPD, pilkades, peran BPD**

# ABSTRAK

Hinza Priatma Adli. NPM 2120600045. 2024. *PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (PILKADES) TAHUN 2023 DI DESA TRAYEMAN KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL*. Skripsi, Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti Tegal. Pembimbing I : Dra.Hj Sri Sutjiatmi, M.Si dan Pembimbing II : H. Agus Setio Widodo.S.IP M.Si

This study aims to analyze the role of the Village Consultative Body (BPD) in the implementation of the 2023 Village Head Election (Pilkades). The BPD as a legislative body at the village level has an important responsibility in overseeing and ensuring that the election process takes place in a democratic, transparent, and accountable manner. The method used in this research is a qualitative approach, with data collection through interviews, observation, and documentation.

The results show that the BPD plays an active role in various stages of Pilkades, from the formation of the election committee to the supervision of budget use. Nonetheless, there are significant challenges faced by the BPD, including, the lack of community understanding of the BPD's functions and duties. Many villagers only experience the BPD in a limited way, so their aspirations are not fully represented. In addition, a lack of socialization and education about the election process and the functions of the BPD means that many villagers do not actively participate in the village democratic process.

The research also found that the BPD often functions as a legitimizing tool for the village head, rather than an independent watchdog. This has resulted in weak checks and balances in village governance. Therefore, there is a need to increase the capacity of BPD members through better training and socialization, as well as efforts to increase community participation in the decision-making process. These recommendations are expected to strengthen the role of the BPD in creating a more transparent and accountable village administration*.*

***Keywords: BPD, village elections, role of BPD***

# MOTTO

"Setiap rintangan adalah jalan menuju kesuksesan."

“Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah:5)

# PERSEMBAHAN

Allhamdulillahirobil’alamin, atas rahmat dan hidayah-Nya dapat terselesaikan skripsi ini dengan baik, dalam menyusun skripsi ini telah melewati suka dan duka, pengalaman, pelajaran, serta kenangan, maka dari itu saya ingin mempersembahkan hasil karya ini kepada:

1. Allah SWT sebagai rasa syukur atas segala rahmat dan kenikmatan yang telah diberikan.
2. Untuk kedua orang tuaku tercinta Bapak Kholis, S.Pd dan Ibu Sri Widayanti yang selalu menyayangiku dan senantiasa memberitahu motivasi serta do'a disetiap dalam hidupku.
3. Adik adikku yang kubanggakan.
4. Keluarga besarku yang senantiasa mendo'akanku.
5. Teman - teman senasib dan seperjuangan yang tidak dapat kusebutkan satu persatu.
6. Almamater kubanggakan Universitas Pancasakti Tegal.

# **KATA PENGANTAR**

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta sholawat serta salam kepada junjungan kekasih-Nya Nabi Muhammad SAW atas selesainya penyusunan skripsi yang berjudul “***PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (PILKADES) TAHUN 2023 DI DESA TRAYEMAN KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL”***

Peneliti menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapakan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang memberikan hambanya berbagai kenikmatan dan kekuatan, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr. Taufiqulloh, M. Hum., Rektor Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan studi di Universitas Pancasakti Tegal.
3. Unggul Sugi Harto, M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
   Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan izin pelaksanaan  
   penelitian.
4. Dra. Sri Sutjiatmi, M.Si., Dosen pembimbing I yang telah memberikan  
   bimbingan, saran, dan motivasi yang sangat bermanfaat kepada peneliti  
   demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Agus Setio Widodo, M.Si., Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran dan motivasi yang sangat bermanfaat kepada peneliti demi kelancaran skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan ilmu, nasihat dan motivasi selama perkuliahan serta staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik membantu terkait dengan administrasi selama peneliti menuntut ilmu di Universitas Pancasakti Tegal.
7. Instansi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Trayeman Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal yang memberikan kesempatan penelitian kepada penulis untuk mengadakan dan mendukung selama penelitian.
8. Pemerintah Desa Trayeman Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal yang memberikan kesempatan penelitian kepada penulis untuk mengadakan dan mendukung selama penelitian.
9. Teman-teman yang telah memberikan dukungan dan doa dalam  
   penyusunan skripsi ini.
10. Kedua orangtua, dan kedua adik saya serta saudara-saudara penulis yang memberikan dorongan moril maupun material pada penulis dalam menempuh studi.
11. Teman-teman seperjuangan sekaligus keluarga UKM FPMM maupun UKM IMPERA yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga selama menempuh studi serta memberikan dorongan dan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak bisa di sebutkan satu persatu yang telah  
    membantu kelancaran proses menyusun Skripsi ini.

Semoga Allah SWT merahmati dan senantiasa didalam lindungan-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari bahwa dalam menyusun Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari  
pembaca. Akhirnya dengan segala kekurangan dan kelemahan yang ada, penulis  
berharap skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Brebes, 05 februari 2025

Hinza Priatma Adli

**DAFTAR ISI**

[ABSTRAK v](#_Toc190877094)

[ABSTRAK vi](#_Toc190877095)

[MOTTO vii](#_Toc190877096)

[PERSEMBAHAN viii](#_Toc190877097)

[KATA PENGANTAR ix](#_Toc190877098)

[DAFTAR TABEL xi](#_Toc190877099)

[DAFTAR GAMBAR xii](#_Toc190877100)

[BAB I PENDAHULUAN 1](#_Toc190877101)

[1.1 Latar Belakang 1](#_Toc190877102)

[1.2 Rumusan Masalah 14](#_Toc190877103)

[1.3 Tujuan Penelitian 14](#_Toc190877104)

[1.4 Manfaat Penelitian 15](#_Toc190877105)

[BAB II 16](#_Toc190877106)

[TINJAUAN PUSTAKA 16](#_Toc190877107)

[II.1. Penelitian Terdahulu 16](#_Toc190877108)

[II.2. Kerangka Teori 22](#_Toc190877109)

[II.3. Definisi Konsep 29](#_Toc190877110)

[II.4. Pokok Penelitian 31](#_Toc190877111)

[II.5. Alur Pikir 34](#_Toc190877112)

[BAB III 35](#_Toc190877113)

[METODE PENELITIAN 35](#_Toc190877114)

[III.1 Jenis dan Tipe Penelitian 35](#_Toc190877115)

[III.2 Jenis dan Sumber Data 36](#_Toc190877116)

[III.3 Informan Penelitian 37](#_Toc190877117)

[III.4 Teknik Pengumpulan Data 38](#_Toc190877118)

[III.5 Teknik Analisis Data 39](#_Toc190877119)

[BAB IV 41](#_Toc190877120)

[DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN 41](#_Toc190877121)

[IV.1 Gambaran Umum Kabupaten Tegal 41](#_Toc190877122)

[IV.2 Gambaran Umum Desa Trayeman Kecamatan Slawi 47](#_Toc190877123)

[BAB V 57](#_Toc190877124)

[HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 57](#_Toc190877125)

[V.1 Hasil Penelitian 59](#_Toc190877126)

[V.2 Pembahasan Atas Hasil Penelitian 92](#_Toc190877127)

[BAB VI 96](#_Toc190877128)

[PENUTUP 96](#_Toc190877129)

[DAFTAR PUSTAKA 99](#_Toc190877130)

# DAFTAR TABEL

[Tabel 1.1 Jumlah Pemilih Desa Trayeman 13](#_Toc185804537)

[Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 21](#_Toc185804537)

[Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Tegal 48](#_Toc185804537)

[Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Trayeman 51](#_Toc185804537)

# DAFTAR GAMBAR

[Gambar 2.1 Alur Pikir 35](#_Toc65931027)

[Gambar 3.2 Skema Analisis Data 40](#_Toc65931027)

[Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Tegal 45](#_Toc65931027)

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Demokrasi merupakan cara untuk melakukan perubahan kekuasaan politik secara teratur sesuai dengan peraturan dan standar etika yang berlaku secara damai. Sistem politik demokrasi di mana kekuasaan pemerintah diperoleh melalui pemilihan umum sangat ideal karena dilengkapi dengan infrastruktur seperti partai politik, parlemen, hukum yang adil, dan jaminan perlindungan hak sipil/hak asasi manusia (Harmes, 2020:201-232). Sebuah negara yang menerapkan sistem demokrasi menunjukkan bahwa negara tersebut telah mengimplementasikan konsep *good governance* dengan baik. Dalam demokrasi, terdapat keterlibatan masyarakat dalam pengaruh terhadap kebijakan pemerintahan, yang menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Salah satu mekanisme untuk menyalurkan demokrasi adalah melalui proses pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala desa. (Mulyono, 2020)

Pemilihan Kepala Desa adalah manifestasi dari proses demokrasi di tingkat desa yang bertujuan untuk menetapkan kepemimpinan desa yang berkualitas. Pemilihan Kepala Desa, atau yang sering disebut Pilkades, adalah proses pemilihan kepala desa secara langsung oleh penduduk desa setempat, berbeda dengan jabatan lurah yang dipegang oleh seorang pegawai negeri sipil. Jabatan kepala desa dapat diisi oleh siapa pun di antara warga biasa. (Averus, 2020) Menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 mengenai Pemilihan Umum, dalam Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa pemilihan umum, atau yang sering disebut sebagai pemilu, adalah salah satu mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara umum, istilah "pemilu" lebih sering mengacu pada pemilihan anggota legislatif dan presiden yang diadakan setiap lima tahun sekali (Junaidi, 2021). Keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pemilihan umum merupakan salah satu ciri dari pemerintahan yang demokratis. Hal ini juga berlaku dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang disingkat sebagai Pilkades. Pilkades, dalam pelaksanaannya, dipilih langsung oleh masyarakat dengan prinsip yang sama seperti Pilpres dan Pilkada, yakni secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Meskipun demikian, Pilkades tidak termasuk dalam kerangka hukum pemilu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 mengenai Pemilihan Umum. (Bunadi, 2020)

Pilkades merupakan wadah untuk menyalurkan hak politik sekaligus pelaksanaan kedaulatan rakyat yang mencerminkan nilai demokrasi pada tingkat desa. Pilkades bukan hanya menjadi penanda partisipasi masyarakat desa dalam pemilihan kepala desa, tetapi juga menjadi instrumen bagi pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk mengawasi dan mengontrol jalannya partisipasi masyarakat, sehingga keputusan politik yang dihasilkan memperoleh legitimasi yang sah menurut hukum. Keputusan dalam pemungutan suara merupakan inti dari masyarakat demokratis, karena keputusan tersebut membentuk komposisi pemerintahan dan menentukan kebijakan yang mengatur kehidupan. Suara pilihan yang diambil individu di kotak suara dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan mereka.

Perilaku seseorang yang memilih dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya seperti afiliasi partai, karakteristik kandidat, posisi kebijakan, faktor sosial ekonomi, dan dampak media (Abramowitz, 2010; Guess et al. 2019; Pennycook and Rand, 2019; Kulachai & Homyamyen, 2023). Hal ini sangatlah penting untuk mendorong partisipasi masyarakat yang terinformasi, meningkatkan integritas pemilu, dan memastikan cita-cita demokrasi dalam hal keterwakilan, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat. Perilaku memilih pemimpin harus dilakukan oleh setiap orang agar sesuai dengan sila pancasila ke empat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah kemitraan Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Anggota BPD adalah perwakilan dari penduduk Desa berdasarkan representasi wilayah, yang dipilih secara demokratis. BPD merupakan sebuah lembaga demokratis yang diharapkan mampu mengakar dan mewujudkan nilai-nilai demokrasi yang telah hidup dalam masyarakat Desa. Pengisian anggota BPD dapat dilakukan melalui pemilihan langsung atau melalui musyawarah perwakilan, sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di Desa masing-masing. Masa keanggotaan BPD berlangsung selama 6 (enam) tahun sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. BPD merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang telah ada sebelumnya, berdasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal bergantung pada prinsip "musyawarah untuk mufakat" (Sofyan, 2020).

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan desa yang demokratis, termasuk dalam proses pemilihan kepala desa, merupakan hal yang penting. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menegaskan bahwa Desa adalah kesatuan hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Fauziah, 2020). Dalam aturan hukum tersebut, Kepala Desa memegang peran penting dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan desa dan merupakan wakil dari pemerintah desa, yang bertanggung jawab atas rumah tangganya serta melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. BPD, yang merupakan lembaga yang mewakili penduduk desa dalam fungsi pemerintahan, dipilih secara demokratis untuk mewakili berbagai wilayah desa (Neonbeni, 2022). Undang-undang Desa juga mengatur tentang pembentukan panitia pemilihan kepala desa yang bertugas melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa, melakukan pemungutan suara, menetapkan calon kepala desa terpilih, dan melaporkan proses pemilihan kepala desa. Pengaturan mengenai pemilihan kepala desa dalam Undang-undang Desa merupakan hal yang baru, sehingga memerlukan penyesuaian dengan kondisi dan tatanan masyarakat desa itu sendiri (Burhan, 2024).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tahun 2016, BPD memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang terdiri dari beberapa hal. Untuk tugas pokok yang dijalankan oleh BPD terdiri dari:(*Tugas Pokok Dan Fungsi BPD*, 2021)

1. Menggali aspirasi masyarakat;
2. Menampung aspirasi masyarakat;
3. Mengelola aspirasi masyarakat;
4. Menyalurkan aspirasi;
5. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
6. Menyelenggarakan musyawarah Desa;
7. Membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades);
8. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
9. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa (Perdes) bersama Kepala Desa;
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPD juga memiliki fungsi yakni membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.(*Tugas Pokok Dan Fungsi BPD*, 2021)

BPD selain memiliki tupoksi juga memiliki peranan yang cukup penting. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis, terutama terkait proses pemilihan Kepala Desa, sangat penting. Salah satu tugasnya adalah terlibat dalam pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 36 Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Badan Pemusyawaratan Desa. Peran BPD dalam proses ini mencakup pembentukan panitia, seleksi calon Kepala Desa, serta pengawasan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 pasal 40 Tahun 2014 tentang Tanggung jawab serta kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara umum, dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa dapat sebagai berikut (Lahmuddin, 2022):

* + 1. Tanggung Jawab BPD dalam Pelaksanaan Pilkades:
       1. Enam bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir, BPD memberikan pemberitahuan tertulis kepada Kepala Desa tentang berakhirnya masa jabatan serta meminta Kepala Desa untuk segera menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes).
       2. Sepuluh hari setelah pemberitahuan terakhir masa jabatan Kades, BPD menyelenggarakan rapat persiapan dengan melibatkan pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat desa untuk membentuk panitia pemilihan, merumuskan tugas, serta kewenangan BPD dalam pemilihan kepala desa.
       3. Panitia pemilihan yang dibentuk oleh BPD terdiri dari unsur perangkat desa, unsur lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat di luar Badan Permusyawaratan Desa.
       4. Ketua BPD memimpin musyawarah desa untuk menyusun Panitia Pemilihan Kepala Desa dan menetapkannya melalui Keputusan BPD.
       5. Hasil penetapan BPD disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
       6. Sebelum menjalankan tugas, anggota panitia pemilihan kepala desa dilantik dan mengucapkan sumpah di hadapan BPD paling lambat tiga hari setelah ditetapkan dalam rapat BPD.
    2. Kewenangan BPD dalam Pelaksanaan Pilkades:

Dalam menjalankan tugasnya, setiap anggota BPD memiliki kewenangan sebagai berikut (Rusdia, 2020):

* + - 1. Mengadakan rapat kerja dengan Pemerintah Desa dan Panitia Pemilihan untuk membahas atau meminta penjelasan mengenai rencana anggaran biaya pemilihan Kepala Desa sebelum memberikan persetujuan dan memantau proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sesuai tahapannya.
      2. Mengawasi penggunaan anggaran biaya pemilihan Kepala Desa.
      3. Apabila ditemukan kelambanan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan, BPD dapat memberikan masukan atau peringatan yang disampaikan dalam rapat kerja antara BPD dan Panitia Pemilihan.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, setiap anggota BPD memiliki kewajiban sebagai berikut (Vica, 2022):

* + - 1. Mengadakan rapat kerja dengan Pemerintah Desa dan Panitia Pemilihan untuk membahas atau meminta penjelasan mengenai rencana anggaran biaya pemilihan Kepala Desa sebelum memberikan persetujuan dan memantau proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sesuai tahapannya.
      2. Memahami segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
      3. Menunjukkan sikap dan tindakan yang sopan, obyektif, serta tidak memihak.
      4. Menempatkan kepentingan tugas di atas kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok.

Berkaitan dengan peran BPD, Desa Trayeman merupakan salah satu desa yang juga terdapat BPD. Desa Trayeman merupakan bagian dari Kecamatan Slawi dengan luas wilayah 93.00 m2 dan populasi mencapai 5.622 dimana wilayah ini merupakan daerah perindustrian atau jasa yang cukup luas. Banyaknya masyarakat dan luasnya daerah sangat mempengaruhi kelancaran keberjalanan pemilihan kepala desa. Perlu pengawasan yang maksimal agar keberjalanan pemilihan berjalan dengan baik, khususnya pemilihan kepala desa di Desa Trayeman. Untuk menjaga ketertiban pemilihan kepala desa maka diperlukan peran Badan Permusyawatan Desa (BPD).

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Trayeman adalah proses demokratis untuk memilih pemimpin desa yang dilakukan secara serentak di berbagai desa di Kab Tegal . Berikut adalah uraian tentang pelaksanaan Pilkades di Desa Trayeman:

1. Persiapan
2. Penetapan Panitia Pilkades: Panitia Pilkades dibentuk oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengatur proses pemilihan. Panitia ini bertanggung jawab untuk menyiapkan semua kegiatan yang terkait dengan Pilkades, seperti sosialisasi, pendaftaran calon, dan pengadaan bahan-bahan yang diperlukan.
3. Pendaftaran Calon: Calon kepala desa harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 10 tahun terakhir, sehat jasmani dan rohani, dan memiliki moral dan budi pekerti yang baik. Panitia Pilkades akan melakukan penjaringan bakal calon dan menerima pendaftaran calon yang memenuhi syarat.
4. Pencalonan
5. Penjaringan Bakal Calon: Panitia Pilkades melakukan penjaringan bakal calon kepala desa untuk memastikan bahwa calon yang mendaftar memenuhi syarat. Mereka akan melakukan verifikasi dokumen dan melakukan wawancara untuk memastikan kelayakan calon.
6. Sosialisasi: Panitia Pilkades melakukan sosialisasi teknis pelaksanaan Pilkades secara terstruktur, sistematis, dan menyeluruh. Sosialisasi ini dilakukan mulai dari tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten untuk memastikan semua pihak sadar dan siap menghadapi Pilkades.
7. Pemungutan Suara
8. Penyelenggaraan Pemungutan Suara: Panitia Pilkades mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan suara, termasuk menyiapkan kartu suara, bilik suara, dan kursi/tempat duduk. Pemungutan suara dilakukan dengan aman dan tertib, dengan adanya pengawasan dari Forkopimda, TNI-Polri, dan panitia pengawas kecamatan.
9. Mengumumkan Nama-nama Calon: Panitia Pilkades mengumumkan nama-nama calon kepala desa dan tempat serta waktu pemungutan suara. Informasi ini disampaikan melalui berbagai media sosial dan pengumuman di desa.
10. Penetapan Hasil
11. Penghitungan Suara: Panitia Pilkades melakukan penghitungan suara dan menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara. Penghitungan suara dilakukan secara transparan dan akurat untuk memastikan hasil yang adil.
12. Mengumumkan Hasil: Panitia Pilkades mengumumkan hasil penghitungan suara dan menetapkan calon kepala desa yang terpilih. Hasil ini disampaikan melalui rapat pernyataan bersama oleh seluruh calon kepada desa dihadapan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah).
13. Laporan dan Pertanggungjawaban
    1. Membuat Berita Acara: Panitia Pilkades membuat Berita Acara Pilkades, laporan pelaksanaan, dan pertanggungjawaban biaya Pilkades. Berita Acara ini digunakan sebagai dokumen resmi untuk mencatat semua kegiatan yang telah dilakukan selama Pilkades.
    2. Melaksanakan Tugas Lain: Panitia Pilkades melaksanakan tugas lain yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkades, seperti mengesahkan kepala desa terpilih.

Dengan demikian, proses Pilkades di Desa Trayeman melibatkan berbagai tahapan yang sistematis untuk memastikan proses demokratis yang transparan dan adil. BPD perlu untuk melakukan sosialisasi agar masyarakat maupun calon pemimpin mengerti akan makna pemilihan kepala desa yang baik dan benar sesuai peraturan yang ada. Kepala Desa sebagai penyelenggara pemerintahan di Desa memerlukan mitra dalam menyelenggarakan Pemerintahan desa dan Pembinaan kemasyarakatan. Dengan kewenangan yang melekat pada BPD terkadang ada kesenjangan hubungan antara Kepala Desa dengan BPD dalam hal-hal teknis terkait dengan Pembangunan Desa.

Peran BPD di Desa Trayeman meskipun telah berjalan cukup baik, namun masih terdapat permasalahan yang harus dicari solusinya. Salah satu permasalahan tersebut adalah berkaitan dengan fungsi pengawasan saat proses pemilihan Kepala Desa. Dalam proses pemilihan kepala desa (Pilkades), masih ditemukan praktik politik uang oleh para calon kepala desa untuk memastikan kelancaran pencalonan mereka. Tindakan ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) dan prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi kejujuran dan integritas. Di sisi lain, terdapat masalah di kalangan warga yang enggan memilih apabila tidak diberi uang. Hal ini mencederai integritas proses pemilihan umum dan mengaburkan esensi demokrasi yang sebenarnya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu warga Desa Trayeman, terungkap bahwa Pilkades sangat kental dengan praktik politik uang, dan warga cenderung tidak mau memilih calon jika tidak ada imbalan uang yang diberikan. Kondisi ini menunjukkan adanya keterputusan antara idealisme demokrasi yang diatur dalam UUD dengan realitas di lapangan. Warga desa, yang seharusnya menjadi partisipan aktif dalam proses demokrasi, justru terjebak dalam praktik yang merusak nilai-nilai dasar demokrasi. Ketergantungan warga pada uang dalam menentukan pilihan mereka menunjukkan lemahnya pemahaman mengenai pentingnya pemilihan berdasarkan visi dan kompetensi calon kepala desa.

Dalam rangka melaksanakan kewajibannya seorang Kepala Desa wajib untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota, menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran, dan memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran. Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis serta dapat dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. dalam upaya menjaga integritas dan objektivitas dalam pemilihan kepala desa, perangkat desa harus mematuhi aturan yang melarang mereka untuk secara aktif mendukung salah satu calon kepala desa, guna memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung secara adil dan tidak berpihak.

Selain itu, minimnya pemahaman pendidikan politik di masyarakat semakin memperburuk situasi ini. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum menyediakan pendidikan politik yang memadai mengenai bahaya politik uang, meskipun hal ini merupakan tugas yang diamanatkan oleh UUD. Tanpa pendidikan politik yang cukup, warga tidak sepenuhnya memahami dampak negatif politik uang, sehingga praktik tersebut terus berlanjut dan merusak proses demokrasi di tingkat desa. BPD diharapkan bisa menunjukkan sikap tegas terhadap setiap pelanggaran peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam pemilihan Kepala Desa.

Nama calon kepala desa yang berpartisipasi dalam pilkades tahun 2023 adalah:

1. Yus Rizal Fauzi
2. Hj Roni
3. Moh. Sony Noviarso
4. Sutardi S.Pd

Dari sejumlah nama yang ikut dalam pilkades tersebut, ternyata yang berhasil menjadi kepala desa terpilih adalah: Moh. Sony Noviarso

Tabel 1.1

Jumlah Pemilih Desa Trayeman

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L | P | Jumlah Pemilih (L+P) | Jumlah TPS | Data Golput |
| 1.902 | 1.995 | 3.897 | 14 | 498 |

*Sumber: Panitia Pilkades Desa Trayeman*

Berdasarkan konteks yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul: “*Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Tahun 2023 Di Desa Trayeman Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal”*

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peranan Badan Permusyawatan Desa (BPD) dalam pemilihan Kepala Desa tahun 2023 di Desa Trayeman, Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal?
2. Apa saja Faktor Penghambat Badan Permusyawatan Desa (BPD) dalam menjalankan peranan terkait pemilihan Kepala Desa tahun 2023 di Desa Trayeman, Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan peranan Badan Permusyawatan Desa (BPD) dalam pemilihan Kepala Desa tahun 2023 di Desa Trayeman, Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal.
2. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat Badan Permusyawatan Desa (BPD) dalam menjalankan peranan terkait pemilihan Kepala Desa tahun 2023 di Desa Trayeman, Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal.

## 1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Untuk memperoleh bukti-bukti data empiris tentang Peranan Badan Permusyawatan Desa (BPD) dalam pemilihan Kepala Desa yang akan bermanfaat untuk megembangkan ilmu pengetahuan, dan akademis mahasiswa di dalam bidang ilmu pemerintahan.

1. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini terdapat beberapa manfaat praktis bagi pihak-pihak terkait, seperti:

1. Bagi Penulis

Melalui penelitian mengenai peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahun 2023 di Desa Trayeman, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, penulis akan memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fungsi dan tanggung jawab BPD dalam konteks pemilihan kepala desa. Selain itu, penulis akan meningkatkan keterampilan dalam mengumpulkan dan menganalisis data, serta menyusun laporan penelitian yang sistematis.

1. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintahan desa terutama berkaitan dengan peningkatan peranan BPD dalam pemilihan kepala desa.

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## II.1. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini diuraikan mengenai beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema penelitian dengan milik peneliti. Meskipun memiliki kesamaan, namun peneliti akan menguraikan hal-hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu tersebut, sehingga pada akhirnya akan memunculkan unsur kebaharuan pada penelitian ini. Berikut adalah uraiannya:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Judul Penelitian dan Nama Peneliti** | **Metode Penelitian** | **Hasil Penelitian** | **Unsur Kebaharuan** |
| 1 | “Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai.”  Ditulis Oleh Supriadi Jaya Abadi, Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2018. (Abadi, 2018) | Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, studi dokumen, studi pustaka dan observasi. | Penelitian ini menghasilkan suatu informasi bahwa BPD di Desa Batu Belerang memiliki peranan yang berkaitan dengan legislasi peraturan desa, peran tersebut tercermin dari adanya 3 tahapan dalam proses legislasi yaitu tahap inisiasi, sosio politik, dan tahapan yuridis. Selain itu terdapat faktor penghambat dan faktor penunjang dari pelaksanaan pembuatan Peraturan di Desa Batu Belerang. | Penelitian milik saudara Supriadi tersebut dengan penelitian milik peneliti memiliki kesamaan yaitu melakukan penelitian yang berkaitan dengan peranan BPD di sebuah desa. Namun keduanya tetap memiliki perbedaan dan ada unsur kebaharuan sebab penelitian milik peneliti secara spesifik membahas mengenai peranan BPD dalam hal pemilihan kepala desa di Desa Trayeman. Hal ini yang tidak terdapat pada penelitian milik Supriadi tersebut. |
| 2 | “Peranan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penetapan Peraturan di Barang Palie Kabupaten Pinrang.”  Ditulis oleh Khaeriah, IAIN Pare-Pare Tahun 2021. (Khaeriah, 2021) | Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. | Hasil dari penelitian ini adalah BPD memiliki fungsi yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa. Pada BPD di Barang Palie pada dasarnya telah melakukan fungsinya dengan baik namun terdapat beberapa fungsi yang belum berjalan maksimal seperti penampung aspirasi masyarakat, bahkan beberapa anggota BPD belum memahami peran dan fungsinya dengan maksimal. | Pada penelitian milik saudara Khaeriah tersebut memiliki kesamaan dengan peneliti yakni membahas peranan BPD, namun hal yang membedakan adalah penelitian tersebut membahas mengenai peran BPD pada penetapan peraturan desa dan dikaitkan dengan hukum Islam. Sedangkan penelitian milik peneliti secara spesifik membahas mengenai peranan BPD dalam hal pemilihan kepala desa di Desa Trayeman. Hal ini yang tidak terdapat pada penelitian milik Khaeriah tersebut. |
| 3 | “Peran Badan Permusyawaratan Desa Desa Keji Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak pada Tahun 2016.”  Ditulis oleh Joko Mardiyanto, Universitas  Boyolali  (Joko Mardiyanto, n.d.) | Metode yang digunakan adalah metode Observasi, Wawancara, Dokumentasi. | penelitian ini menjelaskan bahwa peran BPD dalam pembentukan panitia Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Perda Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 adalah memproses pemilihan Kepala Desa yaitu, membentuk panitia, menyeleksi calon Kepala Desa, dan melakukan pengawasan pemilihan Kepala Desa. Peran BPD Desa Keji secara umum telah berjalan sesuai dengan peraturan. Namun, peran BPD ini masih belum maksimal dalam melakukan pengawasan pemilihan Kepala Desa, yakni masih adanya praktik money politikyang dilakukan oleh calon Kepala Desa. Diharapkan untuk kedepannya, BPD Desa Keji dapat memberi sikap tegas terhadap tindakan yang melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam pemilihan Kepala Desa | Penelitian milik saudara Mardiyanto tersebut memiliki bahasan yang sama dengan penelitian ini yakni tentang peran BPD, namun hal yang membedakan adalah penelitian tersebut membahas mengenai peran BPD Desa Keji Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak pada Tahun 2016. Sedangkan penelitian milik peneliti secara spesifik membahas mengenai peranan BPD dalam hal pemilihan kepala desa di Desa Trayeman. Hal ini yang tidak terdapat pada penelitian milik Mardiyanto tersebut. |

Sumber: review literatur, 2024

Pada uraian penelitian terdahulu tersebut, dapat diartikan bahwa penelitian ini memiliki unsur kebaharuan karena membahas mengenai peranan dari BPD pada pemilihan kepala desa, topik penelitian ini sudah pernah dibahas pada satu penelitian terdahulu yang membedakan yaitu lokasi sampel penelitian tersebut meskipun sama-sama membahas mengenai peranan BPD.

## II.2. Kerangka Teori

1. **Teori Peranan**
   1. **Pengertian Peranan**

Menurut Soerjono Soekamto (2002: 243), peranan dapat diartikan sebagai aspek dinamis dari kedudukan atau status. Ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia sedang melaksanakan peranannya. Sedangkan menurut Miftah Thoha (2011: 263), peranan diartikan sebagai serangkaian perilaku teratur yang muncul akibat dari memegang suatu jabatan atau posisi tertentu yang dapat dengan mudah dikenali.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peranan diartikan sebagai fungsi yang menjadi bagian dari suatu keseluruhan atau yang memegang peran utama dalam terjadinya suatu peristiwa. Dengan demikian, peranan mencakup setidaknya tiga aspek, yaitu:

1. Peranan mencakup norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Dalam pengertian ini, peranan merupakan serangkaian aturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan adalah konsep yang berkaitan dengan apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai sebuah organisasi.

Berdasarkan definisi-definisi yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran adalah sebuah kompleks harapan terhadap bagaimana seseorang bersikap dan bertindak dalam situasi tertentu, yang didasarkan pada posisi tertentu dalam konteks sosial tertentu.

* 1. **Jenis-Jenis Peran**

Jenis-jenis peran dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Peran Normative

Peran yang dijalankan oleh individu atau lembaga berdasarkan seperangkat norma yang berlaku dalam masyarakat.

1. Peran Deal

Peran yang dijalankan oleh individu atau lembaga berdasarkan nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan posisi mereka dalam suatu sistem.

1. Peran Factual

Peran yang dijalankan oleh individu atau lembaga berdasarkan kenyataan konkret di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata. (D Fibiansani, 2018)

1. **Badan Permusyawaratan Desa**
   1. **Pengertian Badan Permusyawaran Desa (BPD)**

BPD atau Badan Permusyawaratan Desa adalah mitra kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenang terkait dengan pelaksanaan pemerintahan desa. Anggota BPD terdiri dari perwakilan masyarakat desa yang dipilih secara demokrasi artinya dipilih oleh masyarakat desa secara langsung. Jumlah anggota BPD adalah sekitar 5 hingga 9 orang, jumlah ini disesuaikan dengan kondisi wilayah desa, keterwakilan perempuan, jumlah penduduk desa hingga kemampuan finansial desa (Basri, 2022).

Keberadaan BPD dapat diartikan sebagai lambang demokrasi yang ada di dalam pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai lembaga legislatif yang ada di desa. Kemunculan BPD di Indonesia sendiri dapat dikategorikan baru, sebab kemunculannya baru ada setelah otonomi daerah diterapkan di Indonesia. Pada Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa pada pasal 1 yang menjelaskan bahwa BPD merupakan lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan di desa di mana anggotanya adalah perwakilan dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah (Amarudin, 2021).

BPD dalam menjalankan perannya terdiri dari pelaksanaan musyawarah desa guna membahas peraturan desa dan membahas hal lain yang terkait dengan permasalahan di desa tersebut. Dalam menampung aspirasi masyarakat desa, BPD melaksanakannya dalam rapat internal BPD guna membahas permasalahan masyarakat desa dalam wilayah dusun untuk kemudian permasalahan tersebut di bawa dalam musyawarah desa. Selain itu BPD juga berperan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dengan cara melakukan monitor dan melakukan evaluasi kinerja kepala desa dalam menjalakan tugasnya memimpin desa. Peran BPD dalam melakukan monitoring dan evaluasi bertujuan untuk mencegah adanya penyelewengan kewenangan dan kekuasaan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Marit, 2021).

* 1. **Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

BPD dalam menjalankan tugasnya memiliki beberapa fungsi yang diatur dalam Pasal 55 Undang – undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi sebagai berikut: (Marit, 2021)

1. Membahas dan juga memberikan kesepakatan mengenai Rancangan Peraturan Desa bersama-sama dengan Kepala Desa;
2. Menampung dan kemudian menyalurkan aspirasi masyarakat tanpa terkecuali;
3. Melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
4. Melakukan fungsi legislatif dengan cara menyusun peraturan desa;
5. Melakukan fungsi konsultatif terkait dengan perencanaan pembangunan desa;

Pada dasarnya fungsi BPD tersebut menunjukkan bahwa BPD secara garis besar memiliki fungsi legislatif yaitu membahas, mengawasi, penyelenggaraan pemerintahan desa serta menyerap, menampung, dan juga menyalurkan aspirasi masyarakat.

* 1. **Tugas BPD**

BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat secara langsung kepada kelembagaan desa dan juga masyarakat desa, khususnya terhadap masyarakat miskin, masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus, perempuan, anak, masyarakat yang masuk kategori lanjut usia dan sebagainya. Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD. Pelaksanaan penggalian aspirasi menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan. Secara terperinci berikut diuraikan mengenai tugas-tugas yang dilakukan oleh BPD, yaitu:

1. BPD menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan pada sekretariat BPD. Aspirasi ini kemudian diadminsitrasikan dan kemudian di bawa dalam musyawarah BPD;
2. BPD melakukan pengelolaan administrasi masyarakat dan juga perumusan administrasi dalam berbagai bidang seperti bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan juga pemberdayaan masyarakat desa. Perumusan aspirasi yang dilakukan oleh BPD dengan cara menganalisa dan kemudian merumuskan aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada Kepala Desa, hal ini dilakukan demi mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan juga kesejahteraan masyarakat;
3. BPD menyalurkan aspirasi yang telah diberikan masyarakat dalam bentuk lisan maupun tertulis. Dalam bentuk lisan biasanya BPD menyalurkan aspirasi masyarakat secara langsung dalam musyawarah BPD yang juga dihadiri Kepala Desa. Sedangkan dalam bentuk tertulis dilaksanakan dengan media surat;
4. BPD melaksanakan musyawarah BPD untuk kemudian menghasilkan keputusan BPD terhadap hal yang bersifat strategis seperti membahas dan juga menyepakati mengenai rancangan peraturan desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan juga menetapkan peraturan tata tertib BPD.
5. Menggali aspirasi masyarakat;
6. Menampung aspirasi masyarakat;
7. Mengelola aspirasi masyarakat;
8. Menyalurkan aspirasi;
9. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
10. Menyelenggarakan musyawarah desa;
11. Membentuk panitia pemilihan kepala desa (pilkades);
12. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antarwaktu;
13. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa (perdes) bersama kepala desa;
14. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa;
15. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa;
16. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya; dan
17. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Pikades

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memainkan peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pikades). BPD merupakan lembaga yang berfungsi sebagai mitra pemerintah desa dalam proses pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam konteks Pikades, BPD bertanggung jawab untuk memastikan proses pemilihan berjalan dengan baik, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tugas ini sangat penting untuk menjaga legitimasi dan kredibilitas hasil pemilihan.

Salah satu peran utama BPD dalam Pikades adalah melakukan pengawasan terhadap tahapan-tahapan pemilihan. Mulai dari penyusunan daftar pemilih, pencalonan, kampanye, hingga penghitungan suara, BPD harus memastikan semua proses tersebut dilakukan dengan jujur dan adil. Pengawasan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan atau pelanggaran yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan.

Dalam menjalankan peran-perannya tersebut, BPD harus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, panitia pemilihan, dan masyarakat desa. Kerja sama yang baik antara BPD dan pihak-pihak tersebut sangat penting untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan Pikades. BPD juga harus menjaga independensi dan netralitasnya dalam menjalankan tugas-tugasnya, agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini tetap terjaga.

Peran BPD dalam Pikades sangatlah krusial. Dengan menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, BPD dapat membantu menciptakan proses pemilihan yang demokratis dan berkualitas, serta memastikan bahwa kepala desa terpilih adalah individu yang mampu dan berkomitmen untuk memajukan desa. Keberhasilan Pikades sangat bergantung pada integritas, profesionalisme, dan dedikasi BPD dalam melaksanakan perannya.

## II.3. Definisi Konsep

Definisi konseptual atau konsep merupakan batasan terkait dengan permasalahan yang muncul dalam sebuah penelitian. Pembatasan tersebut berkaitan dengan tiap variabel yang ada pada penelitian sehingga akan memudahkan peneliti untuk memahami dan melaksanakan kegiatan analisis permasalahan serta supaya konsep yang ada tidak menimbulkan multi tafsir. Definisi konseptual masih berupa konsep yang maknanya masih sangat abstrak walaupun secara intuitif sudah dapat dipahami maknanya.(Moeleong, 2018)

1. Peranan

Peranan adalah serangkaian perilaku, tugas, dan tanggung jawab yang diharapkan dari seseorang atau kelompok dalam konteks sosial atau organisasi tertentu.

1. Desa

Desa adalah unit terkecil dalam struktur pemerintahan Indonesia yang memiliki otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional.

1. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) adalah proses demokratis yang memungkinkan warga desa di Indonesia untuk secara langsung memilih Kepala Desa mereka melalui pemungutan suara. Proses ini mencakup tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara, semuanya diatur oleh peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menjamin transparansi dan keadilan.

1. BPD

BPD adalah singkatan dari Badan Permusyawaratan Desa. BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa dan dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. Anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

1. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Peran BPD adalah sebagai lembaga legislatif di tingkat desa yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi kinerja Kepala Desa. Berikut adalah beberapa peran BPD dalam proses pemilihan Kepala Desa:

* + - 1. Peran dalam Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) terkait Pilkades
      2. Pengawasan dan Penyelenggaraan Pilkades
      3. Keterlibatan dalam Sosialisasi dan Edukasi Pemilih
      4. Mediasi dan Penyelesaian Konflik
      5. Keterbukaan dan Transparansi Proses Pilkades
      6. Kerjasama dengan Pihak Terkait
      7. Partisipasi Anggota BPD dalam Pilkades

Dengan demikian, peran BPD dalam pemilihan kepala desa sangat strategis dan penting untuk memastikan proses pemilihan yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

## II.4. Pokok Penelitian

Pada tahun 2023, BPD Desa Trayeman, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Berikut ini adalah analisis peranan BPD dalam Pilkades 2023 di Desa Trayeman berdasarkan beberapa indikator utama, yaitu:

1. Peran dalam Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) terkait Pilkades

BPD memiliki peranan penting dalam penyusunan peraturan desa yang menjadi dasar pelaksanaan Pilkades. Pada tahun 2023, BPD Desa Trayeman telah menyusun sejumlah peraturan desa yang relevan dengan proses pemilihan kepala desa. Peraturan-peraturan ini mencakup berbagai aspek teknis dan administratif, mulai dari tata cara pencalonan, pelaksanaan kampanye, hingga prosedur penghitungan suara. Anggota BPD secara aktif terlibat dalam setiap tahap penyusunan, memastikan bahwa setiap peraturan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa serta mematuhi regulasi yang lebih tinggi.

1. Pengawasan dan Penyelenggaraan Pilkades

Dalam pelaksanaan Pilkades, BPD bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh tahapan proses pemilihan. Pada tahun 2023, BPD Desa Trayeman menjalankan fungsi pengawasannya dengan ketat, memastikan bahwa setiap tahap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BPD juga bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran yang terjadi, baik itu dalam bentuk kampanye yang tidak sesuai aturan, penggunaan dana yang tidak transparan, maupun kecurangan dalam penghitungan suara. Tindakan yang diambil oleh BPD tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga menjaga integritas dan kredibilitas proses Pilkades.

1. Keterlibatan dalam Sosialisasi dan Edukasi Pemilih

BPD memiliki peran krusial dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi pemilih. Selama tahun 2023, BPD Desa Trayeman mengadakan berbagai kegiatan sosialisasi untuk memperkenalkan calon kepala desa dan memberikan informasi terkait tata cara pemilihan. Kegiatan-kegiatan ini dilakukan secara rutin dan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk pemuda, perempuan, dan kelompok marginal. Materi yang disampaikan tidak hanya informatif, tetapi juga dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam Pilkades.

1. Mediasi dan Penyelesaian Konflik

Pada tahun 2023, BPD berperan sebagai mediator dalam berbagai konflik yang muncul selama proses Pilkades. Konflik-konflik ini bisa berupa perselisihan antar calon, ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil pemilihan, atau sengketa terkait kampanye. BPD Desa Trayeman berhasil memediasi sejumlah konflik tersebut, menyelesaikannya dengan cara-cara yang adil dan bijaksana. Efektivitas BPD dalam menyelesaikan konflik tidak hanya menjaga stabilitas dan ketertiban selama Pilkades, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini.

1. Kerjasama dengan Pihak Terkait

Keberhasilan Pilkades tidak lepas dari kerjasama yang baik antara BPD dengan pihak-pihak terkait. Pada tahun 2023, BPD Desa Trayeman menjalin kerjasama yang erat dengan pemerintah desa, kepolisian, dan berbagai organisasi masyarakat. Kerjasama ini meliputi berbagai aspek, mulai dari penyusunan regulasi, pengamanan selama Pilkades, hingga sosialisasi dan edukasi pemilih. Kolaborasi yang efektif ini tidak hanya memastikan pelaksanaan Pilkades berjalan lancar, tetapi juga memperkuat sinergi antara berbagai lembaga dalam pembangunan desa.

## II.5. Alur Pikir

Berikut akan diuraikan mengenai kerangka pikir yang akan digunakan pada penelitian ini, berikut bagan uraian kerangka pemikiran:

Pelaksanaan Pilkades

Masyarakat Yang Memiliki Hak Pilih

Peran BPD dalam Pilkades

Pokok Pokok Penelitan

1. Peran Dalam Penyusunan Peraturan Desa Terkait Dengan Pilkades
2. Pengawasan Dan Penyelenggaraan Pilkades
3. Keterlibatan Dalam Sosialisasi Dan Edukasi Pemilih
4. Mediasi Dan Penyelesaian Konflik
5. Kerjasama dengan pihak terkait

BPD Menjalankan Perannya Dengan Baik

Pilkades Sukses

**Gambar 2.1 Alur Pikir.**

# BAB III

# METODE PENELITIAN

Pada sebuah penelitian kualitatif akan digunakan metode yang menguraikan perihal cara yang digunakan ketika melakukan penelitian.(Dakhi, 2022) Selain itu terdapat juga metode yang merupakan suatu cara yang nantinya akan dilakukan oleh para peneliti berkaitan dengan pengumpulan data yang berguna untuk melakukan analisis permasalahan.(Sudaryono, 2016) Subagyo turut menuturkan bahwa dalam metode penelitian terdapat suatu jalan untuk mendapatkan solusi yang terbaik pada setiap permasalahan yang timbul.(S, 2012)

## III.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan dasar jenis penelitian lapangan *(Field Research)* yang merupakan suatu pendekatan yang didasarkan pada pengambilan data yang tersedia di lapangan baik dengan wawancara kepada beberapa narasumber maupun observasi pada lokasi penelitian. (Moeleong, 2018) Dalam penelitian ini akan dilakukan penedekatan di lapangan mengenai analisis terhadap Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) tahun 2023 di Desa Trayeman Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal.

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yang merupakan lawan dari data eksperimental. Dalam data kualitatif akan ditunjukan kualitas/mutu untuk sesuatu data yang telah diperoleh dan kemudian diuraikan dalam bentuk pernyataan atau berupa kata-kata. Penelitian kualitatif menempatkan peneliti sebagai instrument kunci sehingga membutuhkan kemampuan khusus guna melakukan penilaian atau deskripsi terhadap obyek penelitian yang dapat menempatkan pengaruh terhadap kualitas data yang diperoleh.(Widoyoko, 2016)

## III.2 Jenis dan Sumber Data

Terdapat beberapa sumber data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu:

1. **Data Primer**

Merupakan data yang perolehannya dilakukan di tengah masyarakat melalui cara wawancara dengan para narsumber dan juga observasi di tengah masyarakat. Untuk mengumpulkan data melalui wawancara, peneliti akan melakukan dengan cara wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur, dimana nantinya keduanya akan digabungkan menjadi wawancara yang mendalam kepada narasumber. (Rukhmana, 2022)Data primer merupakan sumber data penelitian yang perolehannya didapatkan secara langsung dari sumber asli. Data primer terdapat opini subjek baik perorangan maupun kelompok, hasil dari observasi yang dilakukan terhadap suatu benda secara fisik, kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh melalui proses wawancara dengan subjek-subjek penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk naratif atau tulisan yang terkait dengan analisis Peranan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam konteks pemilihan kepala desa (Pilkades) tahun 2023 di Desa Trayeman, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal.

1. **Data Sekunder**

Data ini adalah berkaitan dengan beberapa sumber hukum seperti peraturan perundangan dan literatur kepustakaan lainnya yang masih memiliki kaitan dengan analisis permasalahan (Saebani, 2019). Data ini diperoleh secara tidak langsung. Sumber data dapat diperoleh melalui media perantara yakni sumber data yang pernah dicatat oleh pihak lain. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.

## III.3 Informan Penelitian

1. **Subyek Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan dengan dasar penelitian lapangan artinya terdapat beberapa narasumber yang menjadi subyek dari penelitian, berikut beberapa diantaranya:

1. Badan Pemusyawaratan Desa Trayeman, Slawi, Kabupaten Tegal.
2. Panitia Pemilihan kepala Desa Trayeman,Slawi, Kabupaten Tegal.
3. Masyarakat Desa Trayeman, Slawi, Kabupaten Tegal.
4. **Obyek Penelitian**

Pada penelitian ini mengambil objek penelitian di Desa Trayeman, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal.

## III.4 Teknik Pengumpulan Data

Proses ini dilakukan untuk menentukan seberapa banyak data yang diperoleh untuk menjawab pertanyaan dari permasalahan yang timbul. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Wawancara

Merupakan suatu cara untuk mengumpulkan sejumlah data dengan cara mendapatkan keterangan atau informasi dari narasumber secara langsung yang nantinya hasil wawancara tersebut akan digunakan untuk menganalisis permasalahan. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan narasumber yakni pihak BPD Desa Trayeman dan juga masyarakat Desa Trayeman, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal.

1. Observasi

Observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dalam mengumpulkan data dengan cara langsung terjun ke lokasi dan mengamati segala fenomena yang terjadi dalam masyarakat dan berkaitan dengan penelitian. Observasi akan dilakukan di lokasi.

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara yang dilakukan untuk melakukan pendokumentasian yang bersumber dari buku, koran, aturan perundang-undangan dan sebagainya sebagai sumber informasi yang berguna dalam penelitian. Dokumentasi dilakukan sebagai pedoman dalam menelusuri suatu objek atau subjeknya sekalipun.(Saebani, 2019)

## III.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi sehingga dapat mudah dipahami dan hasilnya dapat diinformasikan kepada orang lain.(Saebani, 2019) Aktivitas dalam analisis data menurut Miles dan Huberman yaitu: *data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.*



Penyajian Data

Pengumpulan Data

Reduksi Data

Kesimpulan/Verifikasi

**Gambar 3.1. Skema Analisis Data** (Saebani, 2019)

Berikut akan diuraikan mengenai beberapa hal yang dilakukan untuk mengnanalisis data yang telah terkumpul:(Saebani, 2019)

* 1. Pengumpulan Data

Mencari informasi dari wawancara dan sumber-sumber lain ke dalam catatan lapangan yang dibagi menjadi beberapa bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif yaitu catatan yang di dapat dari apa yang di liat dan di dengar tanpa adanya interpretasi dari peneliti atau disebut catatan alami. Catatan reflektif yaitu catatan yang berisikan interpretasi tentang temuan yang dijumpai.

* 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Merupakan salah satu bentuk analisis data pada metode kualitatif, dimana pada tahapan ini analisis data yang dilakukan dengan cara menajamkan, menggolongkan, mengarah atau bahkan membuang beberapa data yang dirasa tidak sesuai jika digunakan dalam analisis permasalahan, sehingga nantinya akan diperoleh hasil akhir berupa kesimpulan dan juga saran.

* 1. Penyajian Data (*Display Data*)

Bagian ini merupakan salah satu teknik dalam melakukan analisis dalam metode kualitatif. Pada tahapan ini ada kegiatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan segenap informasi yang telah diperoleh saat penelitian.

* 1. Penarikan Kesimpulan (*Conclution Drawing)*

Kegiatan selanjutnya yang dilakukan dan cukup penting dalam rangkaian tahapan penelitian adalah menarik kesimpulan dan juga verifikasi. Sehingga pada penelitian ini akan dilakukan serangkaian proses hingga berakhir pada penarikan kesimpulan atas segala analisis permasalahan yang telah dilakukan.

# BAB IV

# DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

## IV.1 Gambaran Umum Kabupaten Tegal

* + - 1. **Sejarah Kabupaten Tegal**

Sejarah sebuah kota atau kawasan sering kali tercermin dari jejak peninggalan yang dikenal sebagai warisan budaya dan warisan budaya hidup yang masih ada dan berfungsi di daerah tersebut. Kedua aspek ini merupakan bagian penting dari warisan peradaban umat manusia. Begitu pula dengan Kabupaten Tegal, yang kaya akan jejak sejarah yang membuktikan keterkaitannya dengan garis sejarah yang membentuk kawasan tersebut seperti yang kita kenal saat ini.

Penekanan pada bidang pertanian di Kabupaten Tegal tidak bisa dipisahkan dari kondisi geografis dan akar sejarah wilayah tersebut. Kabupaten Tegal, sebagai kawasan agraris, memiliki tradisi pertanian yang dimulai sejak masa Ki Gede Sebayu, seorang tokoh penting dalam sejarah Tegal yang merupakan juru demung dari trah Pajang. Bahkan, tradisi pertanian di wilayah ini bisa ditelusuri kembali hingga ke masa Mataram Kuno.

Penemuan artefak kuno dan candi di Pedagangan memperkuat kesaksian sejarah ini. Wilayah Tegal sering dikaitkan dengan kerajaan Pajang dan Mataram Islam yang dikenal dengan kekuasaan agrarisnya (De Graaf, 1986). Ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara sejarah wilayah ini dan praktik agraris yang telah ada sejak lama.

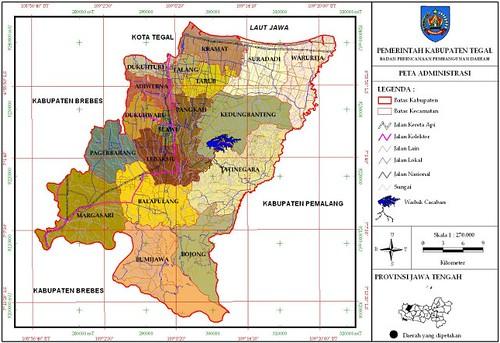
Nama Tegal sendiri berasal dari istilah "Tetegal," yang merujuk pada tanah subur yang dapat menghasilkan tanaman pertanian (Depdikbud Kabupaten Tegal, 1984). Sumber lain menyebutkan bahwa nama tersebut mungkin berasal dari kata "Teteguall," yang diberikan oleh seorang pedagang Portugis bernama Tome Pires saat mengunjungi Pelabuhan Tegal pada tahun 1500-an (Suputro, 1955).

Namun, sejarah Kabupaten Tegal tidak bisa dilepaskan dari tokoh Ki Gede Sebayu. Nama Ki Gede Sebayu sangat terkait dengan trah Majapahit, karena ayahnya, Ki Gede Tepus Rumput (kemudian dikenal sebagai Pangeran Onje), merupakan keturunan Batara Katong Adipati Ponorogo yang memiliki hubungan dengan dinasti Majapahit (Sugeng Priyadi, 2002).

* + - 1. **Kondisi Geografis Kabupaten Tegal**

Kabupaten Tegal adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah, dengan pusat pemerintahan di Slawi. Secara geografis, Kabupaten Tegal terletak pada koordinat 108°57'6" - 109°21'30" BT dan 6°50'41" - 7°15'30" LS. Kabupaten ini memiliki garis pantai sepanjang 30 km dan perbatasan darat sepanjang 27 km dengan negara lain. Luas wilayah daratan Kabupaten Tegal mencapai 87.878,56 ha, sementara luas lautannya adalah 121,50 km². Kabupaten Tegal memiliki lokasi yang sangat strategis, terletak di jalur Semarang - Tegal - Cirebon serta Semarang - Tegal - Purwokerto dan Cilacap, dengan fasilitas pelabuhan yang ada di kota Tegal. Di bagian utara, Kabupaten Tegal berbatasan dengan Kota Tegal dan Laut Jawa; di bagian timur, berbatasan dengan Kabupaten Pemalang; di bagian barat, berbatasan dengan Kabupaten Brebes; sedangkan di bagian selatan, berbatasan dengan Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas.

Wilayah daratan Kabupaten Tegal menunjukkan variasi dalam kemiringan, mulai dari kondisi yang datar hingga sangat curam. Lahan dengan kemiringan datar/pesisir (0-20°) mencakup area seluas 24.547,52 ha, yang meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi, dan Warureja. Lahan bergelombang/dataran (2-15°) mencakup area seluas 35.847,22 ha, yang termasuk Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Talang, Tarub, Pagerbarang, Dukuhwaru, Slawi, Lebaksiu, serta sebagian wilayah Suradadi, Warureja, Kedungbanteng, dan Pangkah. Lahan dengan kemiringan curam/berbukit-bukit (15-40°) meliputi area seluas 20.383,84 ha, sedangkan lahan dengan kemiringan sangat curam/pegunungan (>40°) mencakup area seluas 7.099,97 ha, yang mencakup Kecamatan Jatinegara, Margasari, Balapulang, Bumijawa, Bojong, serta sebagian wilayah Pangkah dan Kedungbanteng.



Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Tegal

Sumber: https://bappeda.tegalkab.go.id/?page\_id=14

Wilayah daratan Kabupaten Tegal menunjukkan variasi dalam kemiringan, mulai dari kondisi yang datar hingga sangat curam. Lahan dengan kemiringan datar/pesisir (0-20°) mencakup area seluas 24.547,52 ha, yang meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi, dan Warureja. Lahan bergelombang/dataran (2-15°) mencakup area seluas 35.847,22 ha, yang termasuk Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Talang, Tarub, Pagerbarang, Dukuhwaru, Slawi, Lebaksiu, serta sebagian wilayah Suradadi, Warureja, Kedungbanteng, dan Pangkah. Lahan dengan kemiringan curam/berbukit-bukit (15-40°) meliputi area seluas 20.383,84 ha, sedangkan lahan dengan kemiringan sangat curam/pegunungan (>40°) mencakup area seluas 7.099,97 ha, yang mencakup Kecamatan Jatinegara, Margasari, Balapulang, Bumijawa, Bojong, serta sebagian wilayah Pangkah dan Kedungbanteng.

* + - 1. **Jumlah Penduduk Kabupaten Tegal**

Di Kabupaten Tegal, total jumlah penduduk mencapai 1.704.700 jiwa, terdiri dari 867.468 laki-laki dan 837.232 perempuan, menunjukkan perimbangan gender yang hampir seimbang dengan sedikit kelebihan laki-laki. Kecamatan Adiwerna mencatat jumlah penduduk terbanyak, yakni 139.469 jiwa, diikuti oleh Kecamatan Pangkah dan Kecamatan Kramat dengan masing-masing 120.485 dan 120.641 jiwa. Sebaliknya, Kecamatan Kedungbanteng memiliki jumlah penduduk terkecil, yaitu 48.494 jiwa, diikuti oleh Kecamatan Pagerbarang dengan 66.791 jiwa. Selisih antara jumlah laki-laki dan perempuan di Kabupaten Tegal adalah sekitar 30.236 jiwa, dengan kecenderungan lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan. Distribusi penduduk ini mencerminkan perbedaan kepadatan penduduk di berbagai kecamatan, yang dapat mempengaruhi perencanaan dan pengelolaan sumber daya serta kebijakan daerah di Kabupaten Tegal.

Tabel 1.4

Jumlah Penduduk Kabupaten Tegal Tahun 2023

| **NO** | **KECAMATAN** | **LAKI-LAKI** | **PEREMPUAN** | **JUMLAH** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Margasari | 60.165 | 58.385 | 118.550 |
| 2 | Bumijawa | 54.717 | 51.556 | 106.273 |
| 3 | Bojong | 41.981 | 39.716 | 81.697 |
| 4 | Balapulang | 51.772 | 49.984 | 101.756 |
| 5 | Pagerbarang | 33.722 | 33.069 | 66.791 |
| 6 | Lebaksiu | 51.666 | 50.816 | 102.482 |
| 7 | Jatinegara | 33.924 | 32.421 | 66.345 |
| 8 | Kedungbanteng | 24.546 | 23.948 | 48.494 |
| 9 | Pangkah | 61.251 | 59.234 | 120.485 |
| 10 | Slawi | 40.912 | 40.705 | 81.617 |
| 11 | Adiwerna | 71.342 | 68.127 | 139.469 |
| 12 | Talang | 56.408 | 53.603 | 110.011 |
| 13 | Dukuhturi | 53.036 | 50.566 | 103.602 |
| 14 | Tarub | 46.588 | 45.093 | 91.681 |
| 15 | Kramat | 60.913 | 59.728 | 120.641 |
| 16 | Suradadi | 50.735 | 48.837 | 99.572 |
| 17 | Warureja | 36.998 | 35.485 | 72.483 |
| 18 | Dukuhwaru | 36.792 | 35.959 | 72.751 |
| **TOTAL** | | **867.468** | **837.232** | **1.704.700** |

Sumber: https://disdukcapil.tegalkab.go.id/data/jumlah\_penduduk

* + - 1. **Visi dan Misi Kabupaten Tegal**
  1. Visi

Mencapai masyarakat Kabupaten Tegal yang sejahtera, mandiri, unggul, berbudaya, serta berakhlak mulia.

* 1. Misi
     + 1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan efektif dalam melayani masyarakat.
       2. Meningkatkan daya saing melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas, terintegrasi, serta ramah lingkungan.
       3. Membangun ekonomi masyarakat yang kuat, berkembang, adil, dan berkelanjutan.
       4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
       5. Menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai, dan nyaman sambil menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

## IV.2 Gambaran Umum Desa Trayeman Kecamatan Slawi

* + - 1. **Sejarah Desa Trayeman Kecamatan Slawi**

Desa Trayeman merupakan sebuah desa hasil kolonisasi yang berasal dari beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Awalnya, Desa Trayeman terletak di kawasan hutan milik Kabupaten Tegal. Pada tahun 1937, sekelompok penduduk kolonisasi datang dan mendirikan desa ini, dengan jumlah awal mencapai 45 kepala keluarga (KK) yang terdiri dari 135 jiwa. Dua tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 1939, jumlah penduduk kembali bertambah dengan kedatangan 100 KK, yang membawa total penduduk menjadi 325 jiwa. Selama periode dua tahun tersebut, jumlah penduduk Desa Trayeman meningkat menjadi 145 KK atau sekitar 460 jiwa. Mereka membuka dan mengelola tanah seluas 82 hektar yang disediakan oleh pemerintah.

Pada tahun 1937, posisi kepala desa dipegang oleh Kartadimedja, yang mengelola administrasi Desa Trayeman pada masa awal berdirinya desa ini. Selama bertahun-tahun, kepemimpinan desa mengalami beberapa perubahan. Kartadimedja memimpin dari tahun 1937 hingga 1957, dan setelah itu jabatan kepala desa diambil alih oleh Suhadi, yang memimpin hingga tahun 1969. R. Sarsito kemudian menggantikan Suhadi dan menjabat dari tahun 1969 hingga 1990. Edi Kasiran menjadi kepala desa pada tahun 1990 hingga 1999.

Periode berikutnya diisi oleh Eko Sudiyanto, S.Sos, yang menjabat sebagai kepala desa terpilih dari tahun 1999 hingga 2007. Eko Sudiyanto kemudian terpilih kembali dan menjabat dari tahun 2007 hingga 2013. Selama periode 2013 hingga 2015, Eko Sudiyanto juga menjabat sebagai penjabat (Pj.) kepala desa. Setelahnya, Fajri Hidayati, A.Md menjabat sebagai Pj. kepala desa dari tahun 2015 hingga 2016, diikuti oleh Ari Mahmudi yang menjadi Pj. kepala desa dari tahun 2016 hingga 2017. Eko Sudiyanto kembali terpilih sebagai kepala desa dan memimpin hingga tahun 2023. Saat ini, jabatan kepala desa dipegang oleh R. Moh. Sony Noviarso yang menjabat sejak tahun 2024 hingga sekarang.

* + - 1. **Kondisi Geografis Desa Trayeman Kecamatan Slawi**

Desa Trayeman terletak di kawasan dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 46 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini memiliki curah hujan rata-rata yang cukup tinggi, yakni 2.800 mm per tahun. Dengan luas total sebesar 93 hektar, Desa Trayeman termasuk dalam kategori wilayah terpencil yang berada di kecamatan Slawi, menjadikannya sebagai salah satu wilayah dengan luas terkecil di kecamatan tersebut. Desa ini dibagi menjadi empat Rukun Warga (RW) yang masing-masing memiliki luas dan jumlah Rukun Tetangga (RT) yang berbeda. RW 1 mencakup area seluas 20 hektar dengan 4 RT, sementara RW 2 memiliki luas 24 hektar dan terdiri dari 5 RT. RW 3 meliputi 23 hektar dengan 4 RT, dan RW 4 mencakup wilayah seluas 26 hektar dengan 5 RT.

Secara geografis, batas-batas wilayah Desa Trayeman dapat dijelaskan sebagai berikut: di sebelah utara, desa ini berbatasan dengan Desa Harjosari Kidul; di sebelah timur, berbatasan dengan Desa Kudaile; di sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Pakembaran; dan di sebelah barat, berbatasan dengan Desa Pedagangan. Batas-batas ini menentukan posisi Desa Trayeman dalam konteks wilayah yang lebih luas, serta hubungan geografisnya dengan desa-desa sekitar.

Adapun mengenai jarak dari pusat pemerintahan, Desa Trayeman terletak sekitar 2,5 kilometer dari pusat pemerintahan kecamatan dan juga berjarak 2,5 kilometer dari ibu kota kabupaten. Untuk jarak menuju ibu kota provinsi, desa ini berada pada jarak sekitar 160 kilometer. Jarak-jarak ini memberikan gambaran mengenai keterhubungan Desa Trayeman dengan pusat administrasi dan pemerintahan yang lebih luas.

* + - 1. **Kondisi Demografis Desa Trayeman Kecamatan Slawi**

Berdasarkan data demografis yang menunjukkan komposisi penduduk menurut usia, terlihat bahwa jumlah penduduk pria lebih rendah dibandingkan dengan jumlah penduduk wanita. Pernikahan di usia muda (17-19 tahun) masih cukup umum terjadi di desa, di mana banyak pasangan yang menikah, kemudian pihak pria sering meninggalkan istri mereka untuk merantau selama beberapa waktu, khususnya setelah kelahiran anak pertama.

Jumlah penduduk pria dan wanita di Desa Trayeman dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Desa Trayeman Berdasarkan Jenis Kelamin

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama Dusun | Jumlah KK | JIWA | | |
| L | P | Jumlah |
| 1 | RW 01 (4 RT) | 295 | 515 | 507 | 1022 |
| 2 | RW 02 (5 RT) | 396 | 625 | 627 | 1297 |
| 3 | RW 03 (4 RT) | 476 | 645 | 677 | 1322 |
| 4 | RW 04 (5 RT) | 527 | 827 | 826 | 1653 |
| Jumlah | | 1694 | 2612 | 2682 | 5294 |

Sumber: https://www.desatrayeman.id/profil/demografis

Secara umum, mayoritas penduduk Desa Trayeman telah menyelesaikan pendidikan hingga tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Namun, dalam enam tahun terakhir, terdapat peningkatan yang signifikan dalam tingkat pendidikan di desa ini, dengan semakin banyak penduduk yang melanjutkan pendidikan hingga tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan bahkan ke perguruan tinggi. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh perbaikan dalam kemampuan ekonomi penduduk, yang memungkinkan mereka untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi untuk anak-anak mereka.

Berdasarkan data terbaru, jumlah penduduk Desa Trayeman adalah sebanyak 1.695 Kepala Keluarga (KK), dengan total populasi mencapai 5.294 orang. Dari jumlah tersebut, terdapat 2.612 pria dan 2.682 wanita. Distribusi usia penduduk menunjukkan bahwa kelompok usia 0 hingga 5 tahun berjumlah 604 orang, sementara usia 6 hingga 12 tahun terdiri dari 559 orang. Kelompok usia 13 hingga 16 tahun mencakup 508 orang, dan mereka yang berusia 17 hingga 20 tahun berjumlah 396 orang. Adapun usia 21 hingga 30 tahun mencakup 881 orang, sedangkan usia 31 hingga 40 tahun terdiri dari 876 orang. Kelompok usia 41 hingga 50 tahun berjumlah 669 orang, dan usia 51 hingga 60 tahun ada 423 orang. Untuk kelompok usia 61 hingga 65 tahun terdapat 129 orang, serta mereka yang berusia lebih dari 65 tahun sebanyak 243 orang.

Dalam hal pendidikan, penduduk Desa Trayeman terbagi dalam beberapa kategori. Sebanyak 1.207 orang belum pernah bersekolah, sementara 771 orang tidak menyelesaikan pendidikan mereka. Mereka yang telah menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SD berjumlah 923 orang, sedangkan 969 orang telah menyelesaikan pendidikan SMP. Jumlah penduduk yang mencapai tingkat SLTA adalah 940 orang, dan 484 orang telah melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Mata pencaharian penduduk Desa Trayeman sangat beragam. Terdapat 14 orang yang bekerja sebagai petani pemilik sawah, sementara 38 orang bekerja sebagai buruh tani dan 48 orang sebagai nelayan. Sejumlah 22 orang menjalankan usaha sendiri sebagai pengusaha, dan 162 orang bekerja sebagai buruh industri. Selain itu, 49 orang bekerja sebagai buruh bangunan, sementara 597 orang terlibat dalam perdagangan. Terdapat juga 13 orang yang bekerja sebagai pengrajin, serta 566 orang yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI, atau POLRI. Di samping itu, terdapat 110 orang yang sudah memasuki masa pensiun.

* + - 1. **Visi dan Misi Desa Trayeman Kecamatan Slawi**
         1. Visi

"Mewujudkan pelayanan masyarakat yang bersih dan transparan untuk menciptakan Desa Trayeman yang mandiri, maju, dan sejahtera."

* + - * 1. Misi

1. Bidang Pemerintahan Desa

Mengoptimalkan pelaksanaan pemerintahan desa dengan cara:

Membentuk pemerintahan desa yang melayani, transparan, dan bebas dari praktek korupsi serta bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Meningkatkan kinerja pemerintahan desa agar disiplin, efektif, dan efisien sehingga dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, seperti dalam pengurusan sertifikat, KTP, KK, dan dokumen lainnya.

Memperbaiki koordinasi dan kerjasama antara berbagai lembaga terkait seperti PKK, Kader Posyandu, dan Kader Kesehatan dengan pemerintahan desa untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Memberdayakan semua organisasi keagamaan dan kepemudaan di desa agar dapat bekerja sama dan berpartisipasi dalam kegiatan desa.

Meningkatkan pengelolaan aset desa, baik untuk pembangunan desa maupun sarana dan prasarana yang ada.

1. Bidang Ekonomi

Meningkatkan perekonomian masyarakat desa dengan cara membangun sarana ekonomi, yang mencakup:

Pengaspalan jalan, baik di jalan utama maupun jalan di sekitar pemukiman masyarakat.

Pembangunan drainase untuk mengatasi kerusakan jalan dan bangunan di sekitarnya serta mengurangi genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk penyebab penyakit.

Pembangunan sarana olahraga seperti lapangan sepak bola, bulu tangkis, bola voli, tenis meja, dll., untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan kuat.

Menyediakan pelatihan dan dukungan bagi warga desa untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas mereka dalam berwirausaha.

Menjaga, melindungi, dan melestarikan lingkungan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

1. Bidang Pendidikan dan Keagamaan

Mewujudkan masyarakat yang terdidik dan beragama agar menjadi masyarakat yang berilmu dan berakhlak dengan cara:

Meningkatkan fasilitas dan kualitas pengajaran di sekolah-sekolah desa seperti PAUD, TPQ, dan Madrasah.

Memberikan honorarium kepada guru ngaji, juru kunci makam, dan petugas pemulasaran jenazah.

Memberikan beasiswa dan bantuan pendidikan kepada anak-anak berprestasi yang kurang mampu.

1. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

Mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera dengan:

Meningkatkan akses layanan kesehatan dan gizi berkualitas bagi warga desa, termasuk lansia, ibu hamil, balita, dan remaja.

Menyelenggarakan program sosial dan memberikan bantuan kepada anak yatim piatu, jompo, janda, dan keluarga yang kurang mampu.

* + - 1. **Peran BPD di Desa Trayeman**

BPD (Badan Permusyawaratan Desa) adalah lembaga penting di tingkat desa yang berperan sebagai wakil dari masyarakat dalam menyusun kebijakan dan mengawasi jalannya pemerintahan desa. BPD adalah wadah representatif bagi warga desa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan dan merumuskan kebijakan demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Perwakilan Masyarakat

BPD merupakan wakil masyarakat desa yang dipilih secara demokratis untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat kepada pemerintah desa.

Musyawarah Desa

BPD menjadi tempat musyawarah untuk membahas masalah-masalah penting yang dihadapi desa dan mencari solusi bersama.

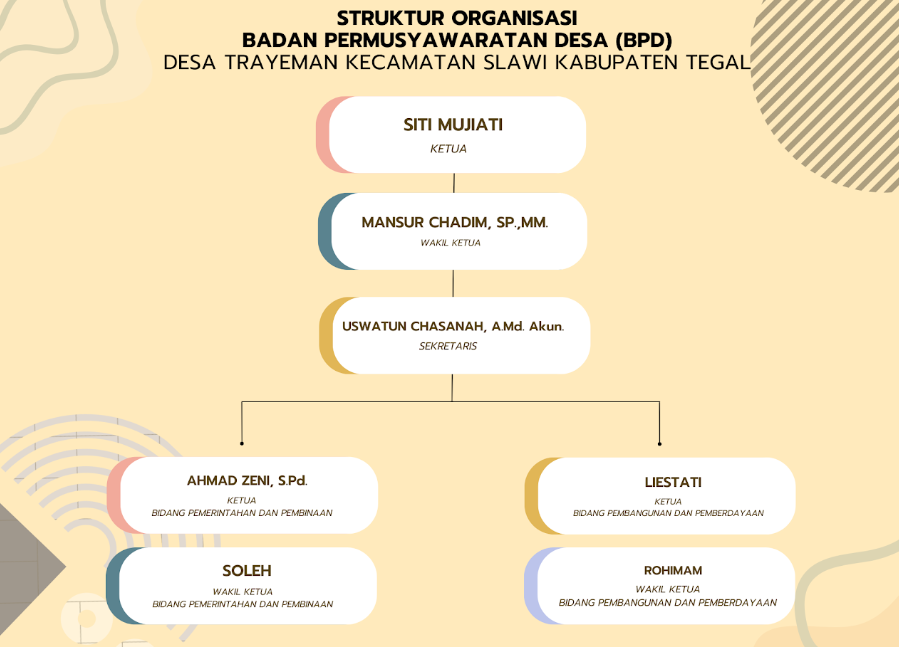
Pengawasan Pemerintahan Desa

BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa agar tetap berjalan dengan transparan dan akuntabel.

Pembinaan Potensi Desa

BPD berperan dalam menggali dan membina potensi desa untuk mengembangkan sektor ekonomi dan sosial.

.

Gambar 4.2 Struktur Organisasi

*Sumber:* *https://www.desatrayeman.id/lembaga-desa/bpd*